

Dari Presiden ke Presiden



Pikiran-pikiran REFORMASI yang Terabaikan

Editor: Victor Silaen

Para Penulis:

Adrianus Meliala, Andrinof Chaniago, Antie Solaiman, Arman Barus
Edwin Tambunan, Einar Sitompul, Hendardi, Herlianto, Indra J. Piliang, J. Anto, Martin Sinaga
Mompang L. Panggabean, Rainy Hutabarat, Victor Silaen

Dari Presiden ke Presiden: **Pikiran-Pikiran Reformasi yang Terbaikan**
ISBN: 979-8148-18-5

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit

Dari Presiden ke Presiden:
Pikiran-Pikiran Reformasi yang Terbaikan

PENERBIT UKI PRESS

Gedung Rektorat Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang - Jakarta 13630 Indonesia

Telp: (021) 809-2425, 800-9190

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Editor: Victor Silaen

Desainer Grafis/Sampul: Fx. Awan Prio Sasongko & Maasbach Jonatan

Cetakan Pertama, 2003

KOMUNITAS NIR-KEKERASAN

Arman Barus

Pendahuluan

Perang dan kekerasan telah dan sedang membentuk peradaban manusia. Sejarah dunia ditulis dengan darah. Peradaban dunia diubah dan berubah oleh darah. Kekerasan terakhir yang mengubah peradaban dunia secara signifikan dikenal sebagai Tragedi 11 September 2001. Tidak heran jika saat ini banyak orang melihat sejarah dunia dalam dua bagian: sebelum dan sesudah 11 September 2001. Mungkin pembagian seperti ini terlalu berlebihan. Namun, jelas Tragedi 11 September membawa dampak yang sangat hebat bagi peradaban dunia masa kini.

Kekerasan mengubah dunia. Fenomena demikian bukanlah sesuatu yang baru. Dua kali perang dunia, misalnya, telah mengubah peradaban manusia. Namun, semakin disadari ternyata perubahan yang disebabkan kekerasan tidaklah membawa pembaruan terhadap peradaban manusia. Kekerasan memang menyebabkan perubahan, tetapi tidak membawa pembaruan. Apakah dunia memang dibentuk oleh kekerasan? Sebenarnya tidak. Peradaban dunia, di lain pihak, diubah dan diperbarui oleh tindakan-tindakan nir-kekerasan. Tetapi, manusia lebih memperhatikan kekerasan karena dianggap hanya kekerasan yang membawa perubahan. Itulah sebabnya, mengapa pembaruan-pembaruan dunia yang disebabkan tindakan-tindakan nir-kekerasan diabaikan. Itulah sebabnya, mengapa sejarah didominasi oleh catatan dan rekaman kekerasan. Dalam kaitan dengan itu, perlu disyukuri ketika Dewan Gereja-gereja Sedunia (WCC) telah menetapkan tahun 2001-2010 sebagai Dekade Menanggulangi Kekerasan (*Decade to Overcome Violence*). Gereja-gereja di Indonesia melalui PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) telah mengadopsi program ini. Dengan demikian, perhatian terhadap nir-kekerasan lebih mencuat ke permukaan.

Di Indonesia, kekerasan tidak saja menjadi catatan sejarah. Bahkan kekerasan sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Memprihatinkan bila muncul

pernyataan bahwa kekerasan sudah merupakan budaya Indonesia. Terlepas apakah setuju atau tidak terhadap frasa “budaya kekerasan” itu, jelas terlihat maraknya berbagai bentuk kekerasan di Indonesia. Sebelum mengusulkan penanggulangan kekerasan, perlu dibentangkan terlebih dulu sketsa buram kekerasan di Indonesia.

Mengapa Kekerasan Terjadi di Indonesia?

Pertanyaan mengapa kekerasan terjadi di Indonesia dapat dijawab dari berbagai disiplin ilmu. Eksposisi sosiologis, psikologis, politis, misalnya, sudah banyak diberikan guna menguak dan memahami kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kekerasan bersifat multidimensi. Namun, sebenarnya kekerasan lebih bernuansa teologis. Sehingga, suatu eksposisi teologis akan lebih memberi pencerahan terhadap kekerasan.

Secara umum tulisan ini melihat dua sebab utama. Kekerasan dipahami sebagai penggunaan kekuatan secara individual dan/atau komunal yang berakibat orang lain atau kelompok lain menjadi terancam atau cedera, bahkan meninggal. Otot lebih digunakan ketimbang otak ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan orang atau kelompok lain. Rumusan di atas menunjukkan bahwa kekerasan terjadi pada tingkat pribadi dan/atau massa. Definisi di atas segera membedakan kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dipahami sebagai tindakan atau perbuatan individu dan/atau komunitas yang tidak diterima oleh negara. Meski kedua kejahatan dan kekerasan tumpang-tindih, namun jelas bahwa negaralah yang merumuskan tindakan atau perbuatan apa saja yang dipandang salah. Kejahatan tidak dilakukan negara, sedangkan kekerasan dapat dilakukan negara.

1. Bangsa yang ramah dan religius?

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan religius. Kedua kata kunci itu (“ramah” dan “religius”) sering dipersepsikan sebagai citra bangsa Indonesia. Tapi, apakah sekarang kedua gambar tersebut masih dapat diterima?

Tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Ungkapan prihatin lebih enak kedengarannya dibanding istilah “bangsa yang sudah hilang peradabannya”. Darah sudah terlalu banyak tercurah di Bumi Pertiwi. Tidak perlu tulisan ini memaparkan

data-data kekerasan yang sudah dan sedang terjadi.¹ Sebagai gambaran, cukup kita tunjuk peristiwa yang terjadi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Sebagai suatu lembaga terhormat, MPR seharusnya mengedepankan dialog rasional dan persuasif dalam memperjuangkan suatu aspirasi. Tetapi, wakil-wakil rakyat tersebut malah mempertontonkan perbuatan irasional dan koersif. Kecerdasan berargumentasi dan berdebat dengan kalimat-kalimat elegan, dan persuasif diganti dengan kekerasan. Ketimbang bermusyawarah, para wakil rakyat lebih suka kekerasan.

Dalam hal kekerasan, mereka mewakili rakyat. Mereka benar-benar wakil rakyat Indonesia. Kekerasan dipandang sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan masalah. Mengingat tingkat kekerasan yang sudah sangat memprihatinkan itu, tidak berlebihan jika dikatakan peristiwa tersebut merupakan *refleksi* suasana batin rakyat Indonesia. Berdasarkan itu, masihkah kita berani menyatakan diri sebagai bangsa yang ramah dan santun?

Mengingat tingkat kekerasan yang sudah demikian memprihatinkan, masihkah tersisa sifat religius bangsa ini? Masihkah berani mengklaim diri sebagai bangsa religius? Pengamatan mendalam memperlihatkan betapa bangsa Indonesia sebenarnya belum mencapai tahap penghayatan agama yang dalam. Patut diragukan apakah bangsa ini dapat disebut sebagai bangsa religius. Kita ternyata masih dalam tahap memahami simbol-simbol agama. Simbol itu sendiri hanya mengekspresikan esensi. Sebagai umat beragama, kita belum memahami esensi simbol-simbol agama. Sebagai contoh, dapat ditunjuk parahnya tingkat korupsi di Indonesia. Sangat sulit diterima akal sehat, bagaimana korupsi dan agama bisa bersanding mesra. Apakah agama mengajarkan korupsi? Tentu saja tidak! Tidak satu pun agama yang membenarkan korupsi. Lebih memprihatinkan lagi bahasa “korupsi” diperhalus dengan bahasa “hibah” atau “mis-manajemen”. Sulit diterima akal mengapa tiba-tiba di Indonesia begitu banyak orang dermawan dan murah hati yang memberi uang dan barang dalam jumlah besar kepada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, untuk sementara dapat disimpulkan, bahwa kekerasan di Indonesia dikarenakan sifat dan karakter bangsa yang ramah dan religius itu ternyata superfisial. Atau, mungkin lebih baik dikatakan

¹ Sebagai contoh lihat Rinaldi Damanik, *Tragedi Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam*, PBHI dan LPS-HAM Sulteng, 2003.

bahwa keramahan dan sifat religius bangsa Indonesia kini telah hilang. Jadi, bukannya bangsa ini tidak memiliki keduanya, melainkan sebagai akibat hal-hal tertentu, kedua karakter itu tidak menonjol saat ini. Kedua karakter ontologis tersebut telah hilang. Tetapi, jika melihat sejarah bangsa Indonesia, bukankah ditemukan banyak perang dan kekerasan? Jika karakter tersebut “hilang”, tentu timbul pertanyaan, mengapa hilang? Penjelasan berikut mungkin dapat menjawab pertanyaan itu.

2. Keterasingan

Kekerasan terjadi karena keterasingan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat yang pluralistik secara etnik dan agama merupakan bentuk awal keterasingan tersebut. Keterasingan ini tentu saja potensial menciptakan permusuhan. Mengapa masyarakat menjadi asing satu dengan lainnya? Hal ini disebabkan hilangnya pengantara atau perekat dalam masyarakat. Apa dan siapa pengantara ini?

Yang dimaksud “apa” dapat berbentuk ideologi, yang merupakan ujud semangat dan cita-cita membentuk satu bangsa. Pada masa rezim Orde Baru berkuasa, ideologi pemersatu (Pancasila) ini telah diselewengkan untuk melanggengkan kekuasaan.² Sementara “siapa” adalah pemimpin masyarakat, khususnya pemimpin-pemimpin informal yang diterima dan dipatuhi masyarakat. Pemimpin informal ini dilenyapkan secara sistematis pada masa rezim Orde Baru. Pemimpin masyarakat direkayasa berbentuk formal. Tidak hanya bersifat formal, namun pemimpin direkayasa menjadi serba-seragam dan sentralistis. Keseragaman dianggap ideal, sementara keragaman dipandang sebagai sumber bencana. Keragaman dianggap kutuk sementara keseragaman adalah berkat. Masyarakat menjadi terasing satu dengan lainnya karena masyarakat, sebagai akibatnya, tidak mampu menerima perbedaan. Setiap perbedaan dianggap merupakan ancaman terhadap keberadaan kelompoknya. Orang lain tidak boleh berbeda dengan saya. Orang lain harus seperti saya. Setiap perbedaan harus diberantas habis. Tidak diberikan ruang untuk perbedaan. Semangat keseragaman ini terlihat jelas, misalnya, dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan

² Perlu dicatat bahwa banyak hal baik yang dihasilkan rezim Orde Baru. Misalnya biaya pendidikan yang relatif murah, ini merupakan prestasi menonjol rezim Orde Baru. Tidak adil jika terlalu memberi penilaian negatif terhadap rezim tersebut.

bentuk dan susunan pemerintahan desa. Syukurlah, kekeliruan ini telah dikoreksi dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang menekankan keaneragaman. Tidak salah jika dinyatakan bahwa keseragaman ternyata melahirkan keterasingan.

Inilah dua alasan utama mengapa kekerasan meluas dan marak di Indonesia. Namun, tidak berarti alasan-alasan lain dikesampingkan. Pengamatan lebih dekat terhadap kedua alasan di atas memberi kesan bahwa kekerasan terjadi karena masyarakat tidak tahu bagaimana hidup tanpa kekerasan. Tidak ada model yang tampil secara jelas mendemonstrasikan nir-kekerasan. Kevakuman nir-kekerasan menyebabkan kekerasan marak. Jika pengamatan ini mendekati kenyataan, bagaimana mengisi kevakuman tersebut? Bagaimana melawan kekerasan?

Melawan Kekerasan

Lahirnya kesadaran bahwa kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang salah merupakan langkah awal gerakan anti-kekerasan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kekerasan salah? Pertanyaan ini penting dan menarik untuk ditelusuri, namun tempat sangat terbatas sekali. Jangan hanya karena bosan dengan maraknya kekerasan akhir-akhir ini sehingga perlu dicari alternatif lain. Sebab, jika ini yang terjadi, maka jika alternatif lain itu membosankan, kita akan kembali lagi pada kekerasan. Jika sudah setuju bahwa kekerasan salah, baru berbicara tentang bagaimana mengatasi kekerasan. Kekerasan ditolak karena kekerasan salah, bukan karena kekerasan membuat hidup menjadi tidak nyaman.

Berhadapan dengan kekerasan, biasanya manusia melawannya dengan dua bentuk tindakan. Pertama, kekerasan dilawan dengan kekerasan. Pandangan ini sangat dominan. Kekerasan dilawan dengan kekerasan dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat umum. Tanpa penggunaan kekerasan, maka dianggap keadilan dan ketertiban tidak akan terwujud. Bahkan tradisi teologi Kristen memberikan pembenaran teologis terhadap pandangan ini. Kekerasan dapat digunakan menghadapi kekerasan, asalkan penggunaannya benar dan adil. Tradisi ini dikenal dengan istilah “perang yang benar” (*just war*), yang dirumuskan pertama sekali oleh Agustinus pada abad ke-4. Kekerasan digunakan dalam upaya menciptakan keadilan dan ketertiban, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindung. Jadi, yang menjadi pokok perhatian adalah perlindungan terhadap masyarakat yang

tidak bersalah. Paul Ramsey dalam buku yang berjudul *The Just War: Force and Political Responsibility* (1983), berpendapat bahwa perang yang benar tidak bertujuan untuk menciptakan perdamaian, melainkan untuk pemulihan keadilan. Penggunaan kekuatan menjadi tidak terelakkan lagi. Dalam pandangan Ramsey, tanpa penggunaan kekuatan bersenjata, tidak akan pernah tercipta kondisi politik yang baik. Karena esensi politik adalah soal penggunaan kekuatan.

Terhadap pandangan itu, Stanley Hauerwas, seorang profesor di Universitas Duke, memberi kritik cukup kuat. Keberatan utama yang diajukan Hauerwas berkaitan dengan kristologi. Ramsey berpendapat bahwa hidup dan ajaran Yesus memperlihatkan prinsip tanpa perlawanan. Hauerwas menolak pendapat Ramsey dengan menunjukkan bahwa justru saliblah yang merupakan perlawanan. Yesus melawan dengan cara yang tidak dipakai oleh musuh-Nya. Salib sebagai bentuk perlawanan sangat berbeda dengan cara musuh-musuh-Nya. Keberatan lain berkaitan dengan pengertian keadilan. Tidak dapat diasumsikan bahwa kata keadilan memiliki arti dan makna yang sama bagi semua orang. Dalam tradisi Kristen, istilah keadilan hanya bermakna bila dibaca secara kristologis.

Kedua, manusia melawan kekerasan tanpa perlawanan apapun. Kekerasan harus diterima dengan pasrah. Gereja harus bersikap pasif dan pasrah menghadapi kekerasan. Pendukung pandangan ini mendasarkannya pada Khotbah Yesus di Bukit seperti, misalnya, Matius 5:38-39. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan menerimanya tanpa perlawanan. Dan lagi, bukankah Yesus mendemonstrasikan ajaran-Nya ini ketika disalibkan? Yesus sama sekali tidak memberikan perlawanan ketika dihina, bahkan disalibkan. Malahan Yesus mengasihi mereka yang menganiaya-Nya. Jadi, murid-murid-Nya harus meneladani perilaku Yesus: menerima kekerasan tanpa perlawanan.

Dalam sejarah gereja, tercatat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip anti-kekerasan melemah setelah Kaisar Constantine (306-337) memproklamkan agama Kristen sebagai agama resmi dalam kekaisaran Romawi pada tahun 313. Karena sebelum peristiwa ini ditunjukkan bahwa gereja purba menganut tradisi anti-kekerasan dengan menolak menjadi tentara. Terhadap pendapat ini, John Stott dalam *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani* (1984:112) menyatakan, bahwa penolakan gereja purba untuk menjadi tentara bukan karena menerapkan prinsip anti-kekerasan, melainkan karena tentara Romawi penuh dengan praktik-praktik

penyembahan berhala. Orang Kristen purba menolak menjadi tentara untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik penyembahan berhala. Jika dicermati lebih lanjut, terlihat ketika di salib, Yesus melakukan perlawanan. Tetapi, Yesus melawan dengan cara-cara yang tidak dipakai musuh-Nya. Bentuk perlawanan-Nya berbeda sekali.

Jika kedua bentuk perlawanan di atas tidak memuaskan, apakah ada tindakan yang lebih akurat secara teologis? Ada. Alternatif ketiga ini disebut perlawanan aktif. Dengan sengaja dipakai kata perlawanan. Kekerasan harus dilawan secara aktif. Bagaimana? Kekerasan dilawan dengan tindakan nir-kekerasan. Pada esensinya tindakan nir-kekerasan menolak pemakaian cara-cara kekerasan. Salib Yesus merupakan ujud nyata suatu bentuk perlawanan. Yesus melawan kekerasan dengan tindakan nir-kekerasan. Yesus tidak menjawab kekerasan dengan cara-cara kekerasan. Jika Yesus melawan kekerasan dengan kekerasan, maka moralitas-Nya tidak lebih baik dari lawan-Nya. Inilah, antara lain, alasan teologis mengapa kekerasan salah.

Bagaimana bentuk perlawanan aktif ini? Pernah diusulkan bahwa tugas gereja adalah mentransformasikan dunia. Agar dunia dapat ditransformasi, maka ada dua cara yang ditempuh gereja. Pertama, transformasi pribadi. Jika pribadi-pribadi berhasil diubah, maka secara otomatis masyarakat juga akan berubah. Jika gereja ingin mentransformasi dunia, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah transformasi anggota masyarakat. Transformasi individual akan bermuara pada transformasi masyarakat. Tanpa transformasi individual tidak mungkin muncul transformasi masyarakat. Menurut pandangan ini, agama menjadi sangat bercorak individualistik. Moralitas religius yang dikembangkan menjadi sangat individualistik, sehingga cenderung eksklusif.

Kedua, transformasi masyarakat. Pandangan kedua ini berpendapat bahwa jika masyarakat ditransformasi, maka pribadi yang membentuk masyarakat juga akan berubah. Bertolak belakang dengan pandangan pertama, maka pandangan kedua menekankan keterlibatan gereja dalam masyarakat secara intens. Para pendukung pendapat ini meyakini bahwa jika masyarakat berhasil ditransformasi, maka anggota-anggota masyarakat turut pula berubah. Sehingga, tidak heran jika pendukung pandangan ini berjuang untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik. Namun, seringkali perjuangan yang mengatasnamakan gereja ini terlepas sama sekali dari gereja. Dan lagi, sebagai akibatnya, batas sakral gereja dan masyarakat menjadi kabur. Yang lebih serius, gereja dan negara berfusi.

Gereja memperdebatkan bahwa salah satu dari kedua pendapat di atas lebih baik. Akibatnya? Gereja terbelah menjadi dua golongan (injili-ekumenis). Tetapi, gagasan transformasi mengandung masalah serius. Misalnya, gereja menawarkan damai dan keadilan kepada dunia dengan asumsi bahwa dunia mengerti arti dan makna damai dan keadilan. Makna damai dan keadilan yang ditawarkan tidak jelas, karena damai dan keadilan tidak dapat dipahami terlepas dari salib Kristus. Dan lagi kata “transformasi” itu sendiri berkonotasi negatif, karena tidak hanya memandang dunia sebagai “objek” bahkan “musuh”. Dunia harus ditransformasikan oleh gereja. Gereja tidak ingin dunia hidup sebagai dunia. Relasi gereja dan dunia diletakkan berhadap-hadapan. Tidak salah jika dikatakan bahwa istilah transformasi merupakan bahasa kekerasan. Bahasa transformasi meletakkan relasi gereja dan dunia pada tataran subjek-objek (relasi “I and It”), dan bukan pada relasi subjek-subjek (relasi “I and Thou”). Sehingga, sebenarnya yang diperlukan bukanlah transformasi, melainkan *alternatif*. Dengan tegas Stanley Hauerwas dalam *Resident Aliens* (1989:38) menulis:

The political task of Christians is to be the church rather than to transform the world. One reason why it is not enough to say that our first task is to make the world better is that we Christians have no other means of accurately understanding the world and rightly interpreting the world except by way of the church.

Jadi, jelas dibutuhkan suatu paradigma baru untuk memahami relasi gereja dan masyarakat. Jika yang dibutuhkan adalah suatu alternatif, maka muncul pertanyaan apa atau siapa alternatif tersebut? Gereja adalah alternatif. Yang dibutuhkan bukan suatu pandangan atau pendapat atau gagasan, melainkan gereja itu sendiri. Hauerwas (1989:83) menulis:

The most interesting, creative, political solutions, we Christians have to offer our troubled society are not new laws, advice to Congress, or increased funding for social programs - although we may find ourselves supporting such national efforts. The most creative social strategi we have to offer is the church.

Gereja tidak berupaya mentransformasi dunia atau menawarkan konsep pembaruan kepada dunia. Melainkan, gereja hidup sebagai gereja, karena gereja adalah etika sosial. Hauerwas menolak pendapat yang menekankan

corak agama yang individualistik dan juga yang sosio-politis. Pendekatan transformasi pribadi menyebabkan gereja menjadi eksklusif dan tidak memiliki dampak terhadap masyarakat. Sementara, pendukung transformasi masyarakat meruntuhkan keunikan gereja. Batas sakral gereja dan dunia menjadi runtuh. Jika pada pandangan pertama gereja menolak dunia, maka pada yang kedua, gereja menjadi dunia. Tetapi, dunia mempertontonkan kekerasan. Gereja memberikan alternatif kepada dunia bagaimana hidup tanpa kekerasan. Gereja menjadi alternatif. Ini artinya gereja *diutus* ke dalam dunia. Jadi, tidak tepat bila gereja terlibat di dunia atau gereja menolak dunia. Sehingga yang dibutuhkan bukan transformasi melainkan alternatif.

Sejak masa Kaisar Constantine (306-337), batas sakral gereja dan dunia telah runtuh. Gerakan Reformasi yang dicetuskan Martin Luther (1483-1546) berupaya membangun kembali batas sakral keduanya. Di samping alasan teologis, ada alasan lain mengapa gereja (baca: agama) dan negara harus dipisahkan secara tajam. Demokrasi modern menuntut pemisahan gereja dan negara secara jelas. Tanpa pemisahan ini, sulit membangun masyarakat yang demokratis. Tanpa adanya pemisahan tegas, politisasi agama tidak terhindarkan lagi. Jika gereja menjadi alternatif bagi dunia, maka dunia tahu bagaimana dunia hidup sebagai dunia. Gereja harus hidup sebagai gereja, sehingga dunia hidup sebagai dunia. Gereja harus mendemonstrasikan bahwa gereja adalah komunitas yang lahir karena kasih dan berjalan dalam kasih. Gereja harus merupakan ujud persekutuan sejati, persekutuan universal yang dibentuk oleh kasih.

Dunia tidak akan pernah paham arti dan makna kasih, serta persekutuan, jika tidak diwujudkan nyata oleh dan melalui gereja. Sebagai alternatif, gereja harus memiliki keunikan. Etika Kristen merupakan wujud nyata keunikan gereja. Moralitas Kristen berangkat dan bertumbuh di dalam dan melalui gereja. Inilah sebabnya mengapa etika Kristen adalah etika sosial. Hauerwas menulis: “All Christian ethics are social ethics, because all our ethics presuppose a social, communal, political starting point - the church” (1989:81). Fokus perhatian tidak lagi diarahkan pada apa yang dilakukan gereja, melainkan pada hakikat gereja itu. Tugas politis utama gereja adalah membentuk suatu *komunitas kasih*. Hauerwas menyatakan bahwa upaya aksi sosial-politis Kristen paling mendasar adalah “creating a community that makes it possible for people like us to live by the truth” (1989:123).

Upaya membentuk komunitas kasih berarti menyatakan gereja adalah etika sosial. Pembentukan komunitas kasih adalah tantangan terbesar bagi gereja dalam setiap generasi. Komunitas kasih dimulai oleh gereja. Keunikan gereja sebagai

komunitas kasih berangkat dari keyakinan bahwa Allah, dan bukannya bangsa-bangsa, yang memerintah dunia. Klausa “Allah, dan bukannya bangsa-bangsa, yang memerintah dunia” sering sekali muncul dalam tulisan-tulisan Hauerwas. Keunikan komunitas Kristen ini ditangkap Hauerwas dengan istilah “a colony of resident aliens”. Allah memerintah dunia sehingga umat-Nya memberi respons dengan hidup sebagai komunitas kasih. Umat Allah adalah komunitas yang melampaui batas-batas gender, status sosial, dan etnik. Dengan perkataan lain, gereja adalah suatu komunitas di mana pluralisme gender, status sosial, dan etnik merupakan suatu keharusan.³ Dengan demikian tugas utama gereja bukanlah menerjemahkan Injil ke dalam dunia modern, melainkan menjadikan dunia diterima Injil. Bahasa menerjemahkannya adalah bahasa transformasi. Yang dibutuhkan sekarang bukanlah bagaimana menerjemahkan Injil kepada masyarakat modern, melainkan suatu demonstrasi (*enactment*) gereja sebagai komunitas kasih. Gereja adalah “the visible, political enactment of our language of God by a people who can name their sin and accept God’s forgiveness and are thereby enabled to speak the truth in love” (1989: 171). Komunitas kasih yang unik ini mendemostrasikan kepada dunia bahwa Allah memerintah dunia ini. Komunitas kasih yang universal, internasional, dan transkultural merupakan bukti bahwa Allah adalah raja atas dunia. Komunitas kasih adalah respons teologis.

Lebih jauh perlu ditelusuri apa yang dimaksud dengan gereja sebagai etika sosial. Hauerwas menolak etika sebagai proses pengambilan keputusan.⁴ Asumsi yang mendasari proses ini adalah kebebasan manusia (*freedom*). Immanuel Kant mengajarkan etika yang berpusatkan pada perbuatan (*moral act*). Etika yang diajarkan Kant, menurut Hauerwas, mendorong terjadinya kekerasan. Hauerwas (1989: 100) mengamati “Kantian ethics not only helped lay the foundation of modern constitutional democracies, but also gave the impetus for modern war”. Hauerwas mengusulkan paradigma baru, yakni etika naratif. Etika naratif memberi perhatian serius pada “siapakah saya” ketimbang “apa yang saya putuskan” (*decision-centred approach*). Proses etika tidak lagi berfokus pada tindakan moral, namun pada manusia sebagai makhluk moral. Perhatian tidak hanya diarahkan pada perbuatan, tetapi pada manusia yang melakukan tindakan. Paradigma berubah dari keputusan moral

³ Gereja-gereja di Indonesia pada umumnya terikat pada etnik tertentu. Kenyataan ini tidak menafikan sifat gereja sebagai komunitas universal yang melampaui batas gender, status sosial, dan etnik.

⁴ Sebagai contoh dapat disebut Malcolm Brownlee, Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di Dalamnya, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981.

kepada pelaku moral, dari perbuatan ke karakter, dari apa yang diputuskan kepada siapa yang memutuskan, dari rasionalitas individu ke naratif komunitas.

Pemahaman etika Kant mengabaikan relasi yang kuat antara tindakan dan komunitas. Tidak ada perbuatan moral yang lepas dari komunitas. Tindakan moral terjadi di dalam dan melalui komunitas. Juga pemisahan antara tindakan dan manusia yang melakukan tindakan tersebut mengabaikan kesatuan manusia dan perbuatannya. Dipahami bahwa etika atau moralitas tidak bersifat individual, melainkan komunal. Saya tidak tahu apa yang baik, jika tidak ada yang memperlihatkan kepada saya tentang apa yang baik itu. Anak kecil belajar berbicara melalui contoh-contoh yang dilihatnya dan didengarnya. Etika bukanlah keputusan seseorang untuk melakukan apa yang baik. Etika dipahami sebagai kumpulan orang-orang yang bersama-sama melakukan apa yang baik. Hauerwas menolak pandangan etika sebagai keputusan pribadi. Sebaliknya ia mengusulkan konsep gereja sebagai etika sosial. Gereja tidak memiliki etika sosial. Gereja adalah etika sosial. Inilah artinya gereja hidup sebagai gereja. Gagasan gereja adalah etika sosial menghubungkan gereja dengan etika sosial secara erat sekali, bahkan tidak terpisahkan.

Gagasan gereja adalah etika sosial memberikan landasan yang kokoh terhadap konsep alternatif yang diusulkan di atas. Gagasan transformasi ditolak karena melemahkan esensi dan hakikat gereja. Konsep transformasi berupaya melenyapkan eksistensi dunia. Sedang konsep alternatif mengupayakan gereja hidup berdampingan dengan dunia. Gereja tidak perlu berupaya menjadi sama dengan atau diterima oleh dunia. Gereja harus berbeda dengan dunia. Gereja adalah alternatif bagi dunia. Secara ontologis gereja tidak sama dengan dunia. Jika gereja tidak hidup sebagai gereja, maka dunia tidak akan pernah tahu dan menyadari dirinya sebagai dunia. Gagasan alternatif tidak mengasingkan gereja dari dunia, juga tidak menjadikannya eksklusif. Sebaliknya gagasan alternatif membuka pemahaman baru akan makna dan tugas gereja diutus ke dalam dunia. Jika komunitas Kristen tidak menunjukkan kepada dunia sebagai komunitas nir-kekerasan, maka dunia tidak akan pernah tahu makna dan bentuk nir-kekerasan. Jika gereja hidup sebagai gereja, maka keragaman diterima sebagai berkat, dan bukan kutuk. *Komunitas Kristen adalah model nir-kekerasan*. Apakah ini gagasan ideal yang tidak menyentuh bumi? Tidak. Pentingnya dan pragmatismenya gagasan alternatif ini diilustrasikan dengan mengutip pengalaman Mohandas Gandhi.

Gandhi, seorang tokoh nir-kekerasan terkenal, mengungkapkan bahwa gerakan *satyagraha* yang dipelopornya mendapat inspirasi dari Khotbah Yesus di Bukit. Ketika ditanyakan mengapa ia tidak menjadi Kristen, maka Gandhi menjawab bahwa ia tidak mau menjadi Kristen karena dilihatnya orang Kristen tidak mempraktikkan Khotbah Yesus di Bukit.

Seandainya gereja hidup sebagai komunitas kasih, munculnya damai yang berkeadilan dan keadilan yang benar bukan merupakan mimpi. Kekerasan hanya dapat dilawan dengan komunitas kasih. Jika umat Kristen tidak hidup sebagai komunitas kasih, maka kekerasan menjadi tidak terkendali. Komunitas kasih harus dijadikan sebagai suatu gaya hidup atau gerakan. Komunitas kasih bukanlah suatu pilihan, melainkan gaya hidup umat yang percaya pada Yesus. Komunitas kasih adalah satu-satunya respons teologis terhadap demonstrasi kasih Allah pada salib Kristus. Komunitas kasih adalah suatu keharusan melawan kekerasan.

Kepustakaan

- Barus, Arman, "Nir-Kekerasan", artikel dalam Majalah *Berita Oikoumene*, PGI, 2002.
- Hauerwas, Stanley, *Resident Aliens*, Nashville: Abingdon, 1989.